

STRUKTUR RELASI KEKUASAAN DAN KOMUNIKASI ELIT DESA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Yorry Hardayani

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

yhardayani@unib.ac.id

Abstract

Article History

Received :05-12-2025

Revised :13-05-2026

Accepted :01-06-2026

Keywords:

Elite Capture,

Elite Theory,

Political

Communication,

Merah Putih Village

Cooperative,

This study analyzes the structure of power relations and communication patterns among village elites in the implementation of the Merah Putih Village Cooperative Program in Bioa Sengok Village, Lebong District, Bengkulu. Using a qualitative approach with data triangulation through in-depth interviews, participant observation, and focus group discussions, the study identified three categories of village elites: formal elites (village officials), informal elites (traditional/religious leaders), and economic elites (local entrepreneurs). The findings show the dominance of informal elites in social legitimacy through strong social and symbolic capital, while formal elites have limited technical knowledge despite their legal authority. The implementation of the program faces challenges in coordination between elites, unclear regulations, and potential overlap with existing BUMDes (village-owned enterprises). The results of the study confirm the gap between top-down program design and the reality of local power. Self-help cooperatives based on social law proved to be more effective than formal programs, demonstrating the importance of traditional legitimacy and social control mechanisms in village governance. The study concludes that optimizing the implementation of the Merah Putih Village Cooperative Program requires reconfiguring power relations to be more equitable by strengthening the capacity of formal elites, revitalizing the role of informal elites, developing checks and balances mechanisms, and strengthening a clear regulatory basis to prevent elite capture and provide a more equitable distribution of benefits for village communities.

Pendahuluan

Dinamika pembangunan pedesaan di Indonesia terus bertransformasi sejak diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih besar bagi desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunannya sendiri. Desentralisasi ini diharapkan mempercepat

kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Namun, implementasinya menghadapi tantangan kompleks, terutama dari dinamika relasi kekuasaan elit desa yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas program pembangunan. Kompleksitas ini semakin terlihat dalam konteks implementasi program ekonomi desa, di mana struktur kekuasaan lokal seringkali menjadi faktor determinan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program.

Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ambisius ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pemerataan ekonomi. Meskipun bertujuan mulia, program ini berpotensi dipengaruhi oleh struktur relasi kekuasaan elit desa yang kompleks. Pengalaman dari program serupa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan adanya pola intervensi kuat dari elit desa yang dapat mempengaruhi distribusi manfaat program. Fenomena *elite capture*, di mana sekelompok kecil individu berpengaruh mengambil alih manfaat program yang seharusnya dinikmati masyarakat luas, menjadi perhatian serius dalam implementasi program pembangunan desa di Indonesia.

Studi tentang elit desa dan *elite capture* dalam konteks Indonesia telah menjadi fokus penting dalam literatur *governance* pedesaan. Meskipun UU Desa 2014 membawa perubahan formal dalam struktur *governance* desa, pola-pola *patronase* lama masih bertahan dalam distribusi sumber daya (Aspinall and Rohman 2017). Desa di Indonesia masih menghadapi tantangan persisten berupa dominasi elit, partisipasi warga yang terbatas, dan akses yang tidak merata terhadap kesejahteraan. Kondisi ini diperparah oleh praktik demokrasi yang seringkali dibajak oleh elit desa yang memiliki modal sosial dan ekonomi kuat, sehingga keputusan politik tidak selalu mencerminkan kebutuhan komunitas yang lebih luas (Hakim et al. 2025). Dalam konteks implementasi program pembangunan, *elite capture* dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari penguasaan posisi strategis, pengalihan manfaat program, hingga manipulasi proses pengambilan keputusan.

Penelitian tentang *elite capture* dan korupsi di dua desa di Provinsi Bengkulu memberikan konteks penting untuk memahami dinamika kekuasaan lokal di kawasan penelitian (Lucas 2016). Studi mereka mengungkapkan bahwa elit desa, khususnya pejabat desa, menggunakan posisi mereka untuk memonopoli perencanaan dan pengelolaan proyek yang seharusnya dirancang dengan fitur partisipatif dan akuntabel. Meskipun demikian, tidak semua elit menggunakan kontrol mereka untuk kepentingan pribadi; beberapa elit justru menggunakan kendali mereka untuk kepentingan komunitas yang lebih luas. Temuan ini menegaskan kompleksitas relasi kekuasaan di tingkat desa, di mana tidak dapat diasumsikan secara sederhana bahwa semua bentuk kontrol elit selalu negatif. Konteks sosial-budaya lokal, khususnya struktur adat dan sistem nilai masyarakat, memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana kekuasaan elit dijalankan.

Dalam konteks kelembagaan ekonomi desa, studi terbaru menunjukkan bahwa BUMDes menghadapi tantangan serius terkait dengan pengelolaan yang

didominasi oleh elit. Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam BUMDes sangat berpengaruh terhadap kinerja, namun praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan struktural (Dewi, Yuliani, and Rahman 2022). Penelitian komparatif tentang village governance regimes di Indonesia mengidentifikasi bahwa sepertiga dari desa yang diteliti termasuk dalam kategori "captured VGRs" (captured village governance regimes), di mana partisipasi dan kompetisi sangat terbatas dan pemerintah desa dijalankan dengan cara yang eksklusif (Aspinall and Rohman 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan elite capture bukan sekadar anomali, melainkan pola sistematis yang memerlukan perhatian serius dalam desain dan implementasi program pembangunan desa.

Teori elit yang dikembangkan oleh Pareto dan Mosca menyediakan kerangka konseptual fundamental untuk memahami dinamika kekuasaan dalam struktur sosial masyarakat. Teori ini berpijak pada premis bahwa dalam setiap masyarakat, kekuasaan politik terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu yang memiliki kapasitas dominan untuk membuat dan mempengaruhi keputusan-keputusan penting. Dalam konteks desa, elit dapat dikategorikan menjadi elit formal (pemerintah desa dan lembaga desa), elit informal (tokoh adat dan agama), dan elit ekonomi (pengusaha lokal dan tokoh ekonomi). Masing-masing kategori memiliki basis kekuasaan yang berbeda, yang dapat dianalisis menggunakan tipologi modal Bourdieu: modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Interaksi kompleks antara berbagai jenis modal ini membentuk struktur relasi kekuasaan yang mempengaruhi implementasi program pembangunan.

Penelitian tentang transformasi dari klien menjadi warga dalam proses demokratisasi di sebuah desa di Jawa Barat menunjukkan bahwa perubahan institusional tidak otomatis mengubah pola relasi kekuasaan yang telah mengakar (van Klinken and Berenschot 2018). Meskipun ada ruang formal untuk partisipasi demokratis, praktik patronase dan ketergantungan patron-klien masih sangat kuat membentuk interaksi politik di tingkat desa. Temuan serupa juga mengidentifikasi fenomena oligarki desa di mana sekelompok kecil keluarga mengendalikan politik desa selama beberapa generasi (Bapa Tokan and Urbanus 2020; Tokan and Ola 2020). Pola oligarki ini tidak hanya mengkonsolidasikan kekuasaan politik tetapi juga mengkonsolidasikan kontrol atas sumber daya ekonomi desa, menciptakan struktur ketimpangan yang sulit diubah melalui intervensi program dari luar.

Komunikasi politik antara elit desa dan masyarakat merupakan dimensi penting namun seringkali terabaikan dalam studi tentang governance desa. Pola komunikasi yang timpang, di mana informasi mengalir secara vertikal dari atas ke bawah tanpa mekanisme feedback yang efektif, cenderung memperkuat posisi elit dan membatasi partisipasi substantif masyarakat. Dalam implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih, pola komunikasi ini menjadi krusial karena program ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang struktur organisasi, model bisnis, dan distribusi manfaat. Ketidakseimbangan dalam akses informasi dan kapasitas untuk memproses informasi teknis dapat menciptakan asimetri kekuasaan yang memfasilitasi elite capture.

Di Kabupaten Lebong, khususnya Desa Bioa Sengok, struktur sosial diwarnai oleh nilai-nilai adat masyarakat Rejang yang memiliki karakteristik unik. Dalam struktur tradisional Rejang, dikenal tuai kutei (tetua kampung) dan

pemegang gelar adat yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan komunal. Seiring dengan modernisasi dan implementasi sistem pemerintahan desa formal, struktur elit telah bertransformasi dengan munculnya elit baru seperti tokoh pendidikan, pengusaha lokal, dan politisi. Transformasi ini menciptakan dinamika kekuasaan yang kompleks di mana legitimasi tradisional berinteraksi dan terkadang berkonflik dengan legitimasi legal-rasional dari sistem pemerintahan formal.

Munculnya Program Koperasi Desa Merah Putih menimbulkan pertanyaan penting tentang hubungannya dengan kelembagaan ekonomi desa yang sudah ada, khususnya BUMDes. Perdebatan tentang potensi tumpang tindih dan konflik kepentingan antara kedua lembaga ini telah menjadi topik diskusi intensif di kalangan praktisi dan akademisi. Faedlulloh (2018) dalam studinya tentang BUMDes dan kepemilikan warga menekankan pentingnya membangun skema organisasi partisipatoris yang melibatkan warga secara substansif, bukan hanya nominal. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa keterlibatan warga yang substantif seringkali terhambat oleh dominasi elit yang menggunakan posisi mereka untuk mengkonsolidasikan kontrol atas kelembagaan ekonomi desa. Dalam konteks ini, desain institusional program menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme checks and balances berfungsi efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Tantangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi desa merupakan isu krusial yang mempengaruhi efektivitas implementasi program. Pengalaman BUMDes menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama adalah menemukan pengelola dari warga lokal yang memiliki kompetensi memadai dalam manajemen keuangan, bisnis, operasional, dan pemasaran. Keterbatasan kapasitas ini tidak hanya berdampak pada kinerja operasional tetapi juga menciptakan ketergantungan pada segelintir individu yang memiliki kapasitas, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi mereka sebagai elit dan meningkatkan risiko elite capture. Dalam konteks Program Koperasi Desa Merah Putih yang menargetkan pengelolaan dana signifikan (3-5 miliar rupiah per koperasi), persoalan kapasitas SDM menjadi semakin krusial dan memerlukan strategi pengembangan kapasitas yang sistematis dan berkelanjutan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bioa Sengok, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, yang merupakan lokasi strategis untuk menganalisis interaksi antara struktur kekuasaan tradisional Rejang dengan program pembangunan modern. Data BPS Kabupaten Lebong menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, desa ini masih menghadapi tantangan pembangunan dengan angka kemiskinan 17,8%, lebih tinggi dari rata-rata kabupaten (15,2%) (BPS Kabupaten Lebong 2025). Kesenjangan ini menjadi konteks penting dalam memahami dinamika relasi kekuasaan elit desa, karena kondisi ketimpangan seringkali menjadi lahan subur bagi praktik elite capture. Dengan skala program yang besar dan alokasi sumber daya yang signifikan, Program Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi arena baru bagi elit desa untuk memperoleh dan mengkonsolidasikan kekuasaan, namun juga dapat menjadi instrumen untuk transformasi struktural jika dikelola dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur relasi kekuasaan dan pola komunikasi elit desa dalam implementasi

Program Koperasi Desa Merah Putih dengan menggunakan pendekatan teoretis yang mengintegrasikan teori elit dan konsep elite capture. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami dinamika kekuasaan lokal dalam konteks program pembangunan, serta kontribusi praktis dalam merumuskan strategi untuk mengoptimalkan implementasi program melalui rekonfigurasi relasi kekuasaan yang lebih berkeadilan. Tiga pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah: (1) Bagaimana struktur relasi kekuasaan elit desa di Desa Bioa Sengok berdasarkan sumber daya, legitimasi, dan jaringan yang dimiliki? (2) Bagaimana struktur relasi kekuasaan dan pola komunikasi elit desa mempengaruhi proses implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih? (3) Strategi apa yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan implementasi program melalui rekonfigurasi relasi kekuasaan dan perbaikan pola komunikasi yang lebih inklusif dan berkeadilan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (Yin 2009) untuk menganalisis struktur relasi kekuasaan dan komunikasi elit desa dalam implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bioa Sengok, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menangkap kompleksitas fenomena sosial-politik, terutama dalam konteks relasi kekuasaan elit desa yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang makna, konteks, dan proses yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (McNabb 2015). Jenis penelitian studi kasus dipilih karena kemampuannya untuk menganalisis fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat dengan jelas. Implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bioa Sengok merupakan kasus spesifik yang memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana struktur relasi kekuasaan elit desa mempengaruhi implementasi program pembangunan dalam konteks sosial-politik dan budaya yang unik.

Penelitian dilaksanakan di Desa Bioa Sengok, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, desa ini memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik dengan mayoritas penduduk beretnis Rejang, yang memungkinkan analisis tentang bagaimana struktur sosial tradisional berinteraksi dengan program pembangunan modern. Kedua, berdasarkan studi pendahuluan, terdapat indikasi adanya dinamika elit yang menarik untuk dikaji, dengan pola relasi kekuasaan yang kompleks antara elit formal (pemerintah desa), elit informal (tokoh adat dan agama), dan elit ekonomi (pengusaha lokal). Ketiga, sebagai bagian dari Kabupaten Lebong yang menjadi fokus studi tentang elite capture, lokasi ini memberikan kontinuitas dalam pemahaman tentang dinamika kekuasaan lokal di kawasan Rejang. Keempat, implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih di desa ini masih berada pada tahap awal, memberikan kesempatan untuk menganalisis proses pembentukan dan potensi permasalahan sejak dini.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria spesifik untuk memastikan representasi yang komprehensif dari berbagai kategori elit desa dan stakeholder terkait (Maxwell 2013). Kategori pertama adalah elit formal yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa (sekretaris desa, bendahara, dan kepala-kepala urusan), serta anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). Elit formal dipilih karena mereka memiliki kewenangan legal dan peran sentral dalam implementasi program pemerintah di tingkat desa. Kategori kedua adalah elit informal yang mencakup tokoh adat yang memegang posisi penting dalam struktur tradisional Rejang, tokoh agama yang memiliki pengaruh signifikan dalam komunitas, dan tokoh masyarakat yang diakui secara luas meskipun tidak memegang posisi formal. Elit informal dipilih karena mereka memiliki legitimasi sosial dan kemampuan mobilisasi masyarakat yang kuat. Kategori ketiga adalah elit ekonomi yang terdiri dari pengusaha lokal yang menjalankan usaha produktif, pemilik lahan pertanian dan perkebunan yang signifikan, serta individu yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi. Elit ekonomi dipilih karena mereka memiliki modal ekonomi yang dapat mempengaruhi implementasi program.

Selain tiga kategori elit utama, penelitian juga melibatkan informan pendukung yang terdiri dari pengurus dan anggota Koperasi Desa Merah Putih yang baru dibentuk, untuk memahami perspektif mereka tentang proses pembentukan dan dinamika internal organisasi. Masyarakat umum yang tidak termasuk dalam kategori elit juga dilibatkan untuk mendapatkan perspektif tentang bagaimana mereka melihat struktur kekuasaan di desa dan akses mereka terhadap program. Pejabat pemerintah kabupaten yang terlibat dalam implementasi program, khususnya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Koperasi dan UKM, diwawancarai untuk memahami perspektif pemerintah atas tentang desain dan implementasi program. Akademisi dari Universitas Bengkulu yang terlibat dalam pendampingan program juga menjadi informan untuk mendapatkan perspektif eksternal yang kritis. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 35 orang yang dipilih secara purposif untuk memastikan saturasi data dan representasi yang komprehensif dari berbagai perspektif.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diteliti (Ridder et al. 2014). Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan seluruh informan kunci menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan eksplorasi isu-isu yang muncul selama wawancara. Wawancara difokuskan pada eksplorasi persepsi, pengalaman, dan perspektif informan terkait struktur kekuasaan di desa, pola komunikasi antar elit dan antara elit dengan masyarakat, serta implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih. Setiap wawancara berlangsung antara 60 hingga 90 menit, direkam dengan persetujuan informan, dan kemudian ditranskrip verbatim untuk analisis. Kedua, observasi partisipan dilakukan terhadap berbagai kegiatan terkait implementasi program, termasuk rapat pembentukan koperasi, musyawarah desa, pertemuan pengurus koperasi, dan kegiatan sosialisasi program. Observasi difokuskan pada pola interaksi antar aktor, proses pengambilan keputusan, dinamika kekuasaan yang terjadi dalam setting alamiah, serta pola komunikasi verbal dan non-verbal. Catatan lapangan dibuat secara sistematis untuk mendokumentasikan pengamatan dan refleksi peneliti.

Ketiga, Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif kolektif tentang implementasi program dan peran elit desa. FGD pertama dilakukan dengan kelompok elit formal untuk memahami perspektif mereka tentang tantangan implementasi program dan koordinasi antar lembaga. FGD kedua dilakukan

dengan kelompok elit informal untuk mengeksplorasi pandangan mereka tentang kesesuaian program dengan nilai-nilai lokal dan mekanisme governance tradisional. FGD ketiga dilakukan dengan kelompok masyarakat umum untuk memahami persepsi mereka tentang struktur kekuasaan dan akses terhadap program. Setiap FGD diikuti oleh 8-12 peserta, berlangsung selama 90-120 menit, dan difasilitasi menggunakan protokol yang terstruktur untuk memastikan partisipasi yang seimbang dari seluruh peserta. Diskusi dalam FGD direkam dan ditranskrip untuk analisis. Keempat, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen terkait, termasuk dokumen pemerintah tentang Program Koperasi Desa Merah Putih (Inpres No. 9 Tahun 2025, surat edaran, dan petunjuk teknis), dokumen desa (profil desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dokumen koperasi (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, struktur organisasi, notulen rapat, daftar anggota), serta data statistik dan publikasi terkait lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik yang melibatkan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola-pola (tema) dalam data melalui enam tahapan sistematis (Miles and Huberman 2016). Tahap pertama adalah familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang keseluruhan data dan mengidentifikasi pola-pola awal yang muncul. Tahap kedua adalah pengkodean awal secara sistematis untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kode-kode yang dikembangkan meliputi kategori elit desa (formal, informal, ekonomi), jenis sumber daya yang dimiliki (modal ekonomi, sosial, budaya, simbolik), bentuk legitimasi (tradisional, karismatik, legal-rasional), pola jaringan (horizontal, vertikal), pola komunikasi (vertikal, horizontal, formal, informal), serta bentuk elite capture (material, symbolic, political).

Tahap keempat adalah peninjauan tema untuk memastikan koherensi internal setiap tema dan perbedaan yang jelas antar tema. Proses ini melibatkan pengecekan apakah kode-kode dalam satu tema koheren dan apakah tema-tema yang berbeda memiliki perbedaan yang jelas. Jika diperlukan, tema-tema direvisi, digabungkan, atau dipisahkan untuk mencapai struktur tematik yang optimal. Tahap kelima adalah pendefinisian dan penamaan tema secara jelas untuk menangkap esensi dari apa yang direpresentasikan oleh setiap tema. Setiap tema diberi nama yang deskriptif dan didefinisikan secara operasional untuk memandu analisis dan penulisan. Tahap keenam adalah penulisan laporan dengan menganalisis dan menginterpretasikan tema-tema untuk menjawab pertanyaan penelitian, dengan dukungan bukti dari data berupa kutipan wawancara, catatan observasi, dan kutipan dokumen. Analisis tidak hanya mendeskripsikan tema-tema tetapi juga menginterpretasikan signifikansinya dalam konteks pertanyaan penelitian dan kerangka teoretis.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil analisis, penelitian ini menggunakan beberapa strategi. Pertama, triangulasi metodologis dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data (wawancara, observasi, FGD, studi dokumentasi) untuk mengkonfirmasi temuan dari berbagai sumber. Kedua, triangulasi sumber dilakukan dengan melibatkan berbagai kategori informan untuk mendapatkan perspektif yang beragam tentang fenomena yang sama. Ketiga, member checking dilakukan dengan memvalidasi hasil analisis

kepada informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan perspektif dan pengalaman mereka. Keempat, peer debriefing dilakukan dengan mendiskusikan temuan dan interpretasi dengan peneliti lain dan akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang governance desa untuk mendapatkan feedback kritis. Kelima, audit trail dipertahankan dengan mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses penelitian, dari desain penelitian, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi, untuk memastikan transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Keenam, reflexivity dilakukan dengan peneliti secara kritis merefleksikan posisi, bias, dan asumsi mereka sendiri yang mungkin mempengaruhi proses penelitian dan interpretasi data.

Penelitian ini juga memperhatikan pertimbangan etis dalam seluruh proses penelitian. Informed consent diperoleh dari seluruh informan sebelum wawancara atau partisipasi dalam FGD, dengan menjelaskan tujuan penelitian, proses yang akan dilakukan, hak-hak informan, dan penggunaan data. Kerahasiaan informan dijaga dengan menggunakan pseudonym dalam penulisan laporan dan memastikan bahwa informasi yang sensitif tidak dipublikasikan dengan cara yang dapat mengidentifikasi informan. Data penelitian disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh tim peneliti. Prinsip do no harm dipertahankan dengan memastikan bahwa partisipasi dalam penelitian tidak membahayakan informan, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Penelitian ini telah mendapatkan izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong serta persetujuan dari pemerintah Desa Bioa Sengok sebelum pelaksanaan pengumpulan data.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur relasi kekuasaan elit desa di Desa Bioa Sengok terdiri dari tiga kategori utama yang saling berinteraksi dan terkadang tumpang tindih dalam membentuk dinamika kekuasaan lokal. Elit formal yang terdiri dari aparat pemerintah desa memiliki legitimasi legal-rasional yang kuat berdasarkan sistem pemerintahan formal, namun menghadapi keterbatasan dalam hal modal budaya dan akses terhadap informasi teknis tentang program-program pembangunan. Elit informal yang mencakup tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memiliki legitimasi tradisional dan karismatik yang kuat berdasarkan pengakuan komunitas terhadap otoritas moral dan simbolik mereka, serta memiliki modal sosial yang mendalam melalui jaringan kekerabatan dan ikatan sosial-budaya. Elit ekonomi yang terdiri dari pengusaha lokal dan pemilik lahan produktif memiliki modal ekonomi yang signifikan dan legitimasi yang bersumber dari kontribusi mereka terhadap kesejahteraan ekonomi komunitas. Interaksi kompleks antara ketiga kategori elit ini membentuk struktur relasi kekuasaan yang mempengaruhi implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih dalam berbagai aspek, dari inisiasi, pembentukan kepengurusan, operasionalisasi, hingga distribusi manfaat.

Elit formal di Desa Bioa Sengok menunjukkan karakteristik yang kompleks dengan kelebihan dan keterbatasan yang jelas. Berdasarkan wawancara dengan Anton, seorang perangkat desa, terungkap bahwa elit formal menghadapi kebingungan signifikan dalam memahami dan mengimplementasikan program baru. Anton menyatakan bahwa aparat desa bingung karena apa yang mereka sampaikan bisa berbeda dengan persepsi lembaga lain, dan bahkan teman-teman

desa bertanya bagaimana menyikapi adanya dua lembaga ekonomi yaitu BUMDes dan Koperasi Merah Putih. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun elit formal memiliki kewenangan legal untuk mengimplementasikan program, mereka menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan teknis dan pemahaman konseptual tentang bagaimana program baru ini berinteraksi dengan kelembagaan yang sudah ada. Keterbatasan ini tidak hanya bersifat individual tetapi juga struktural, terkait dengan sistem pelatihan dan pendampingan yang tidak memadai dari pemerintah atas. Pak Kabid Pemdes dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten mengakui bahwa sumber daya manusia di desa belum merata, dengan banyak yang hanya tamatan SMA dan akses internet yang terbatas, yang mempersulit akses terhadap informasi dan panduan teknis yang diperlukan.

Modal sosial elit formal terbangun terutama melalui jaringan vertikal dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten, yang memberikan mereka akses ke informasi dan sumber daya dari pemerintah atas. Namun, jaringan horizontal mereka dengan sesama elit desa dan dengan masyarakat umum masih perlu diperkuat untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif dalam implementasi program. Modal simbolik elit formal bersumber dari pengakuan masyarakat terhadap posisi formal mereka dalam struktur pemerintahan, namun legitimasi ini dapat terkikis jika mereka tidak mampu menunjukkan kompetensi dalam mengelola program dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Anton menjelaskan dilema yang dihadapi elit formal terkait regulasi program: BUMDes memiliki legalitas yang jelas dengan UU, PP No. 11 Tahun 2021, dan turunan dari UU Cipta Kerja, sementara Koperasi Merah Putih sejauh ini baru berdasarkan Inpres dan belum ada regulasi formal yang rinci. Ketidakjelasan regulasi ini menciptakan ketidakpastian dan keraguan di kalangan elit formal dalam mengambil keputusan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas implementasi program.

Elit informal di Desa Bioa Sengok menunjukkan kekuatan yang signifikan dalam hal legitimasi sosial dan kemampuan mobilisasi masyarakat. Dalam konteks masyarakat Rejang, elit informal yang mencakup tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam struktur sosial tradisional dan pengambilan keputusan komunal. Modal budaya elit informal termanifestasi dalam pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, nilai-nilai tradisional, dan kearifan lokal yang masih dihormati dan dipraktikkan oleh masyarakat. Modal simbolik mereka bersumber dari prestise dan status sosial yang diakui secara luas oleh komunitas, yang memberikan mereka otoritas moral untuk mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Anton menjelaskan kekuatan modal sosial elit informal dengan merujuk pada pengalaman Desa Rimbo Pengadang yang masih mematuhi hukum sosial, sehingga koperasi yang digerakkan secara swadaya justru lebih berjalan baik dibandingkan koperasi formal. Contoh ini menunjukkan bahwa legitimasi tradisional dan mekanisme kontrol sosial yang dimiliki elit informal dapat menjadi sumber daya yang sangat efektif dalam memastikan partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi desa.

Mekanisme governance yang dikembangkan dalam koperasi swadaya yang dipandu oleh elit informal menunjukkan karakteristik yang menarik dan efektif. Anton menjelaskan bahwa dalam rapat tahunan koperasi swadaya desa, semua masalah dibahas secara transparan termasuk menyebut nama-nama anggota yang bermasalah, sehingga menciptakan efek jera dan mendorong tanggung jawab

pribadi karena adanya rasa malu sosial. Mekanisme ini berbasis pada nilai-nilai komunitarian dan pengakuan bersama terhadap norma-norma sosial yang mengatur perilaku individu dalam konteks kolektif. Efektivitas mekanisme ini mengkonfirmasi argumen McCarthy dan Vel (2016) bahwa dalam beberapa kasus, elit lokal yang "ditangkap" oleh ekspektasi sosial dan hubungan timbal balik dalam komunitas dapat menghasilkan outcome yang lebih baik dibandingkan dengan mekanisme formal yang tidak memiliki basis sosial yang kuat. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kekuatan elit informal dapat menjadi pedang bermata dua: di satu sisi dapat memfasilitasi governance yang efektif berbasis nilai komunitarian, tetapi di sisi lain dapat memperkuat struktur kekuasaan tradisional yang mungkin tidak selalu demokratis dan inklusif terhadap kelompok marginal.

Elit ekonomi di Desa Bioa Sengok memiliki karakteristik yang berbeda dari dua kategori elit lainnya, dengan basis kekuasaan yang terutama bersumber dari modal ekonomi yang mereka miliki. Endaten, seorang pelaku ekonomi desa, menjelaskan basis ekonomi desa yang saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertanian, terutama sawah dan perkebunan kopi. Ia menyatakan bahwa untuk saat ini, khususnya di Desa Bioa Sengok, belum ada pengaruh dari Koperasi Merah Putih karena belum ada sosialisasi yang memadai, dan situasi ekonomi desa masih mengandalkan sektor pertanian dengan harga kopi yang saat ini lumayan bagus. Pernyataan ini menunjukkan bahwa elit ekonomi memiliki fokus yang sangat pragmatis pada aspek operasional dan ekonomi praktis, dengan perhatian utama pada bagaimana program dapat memberikan manfaat konkret bagi usaha mereka. Modal sosial elit ekonomi terbangun melalui jaringan bisnis dan hubungan ekonomi dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun regional. Modal budaya mereka bervariasi, dengan sebagian memiliki pengetahuan bisnis dan kewirausahaan yang baik yang diperoleh melalui pengalaman praktis menjalankan usaha. Modal simbolik elit ekonomi bersumber dari status mereka sebagai orang yang berhasil secara ekonomi dan dapat memberikan lapangan kerja atau peluang ekonomi bagi masyarakat lain.

Legitimasi elit ekonomi bersifat pragmatis dan fungsional, didasarkan pada kemampuan mereka dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi komunitas. Dalam konteks implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih, elit ekonomi berpotensi menjadi tulang punggung operasional karena pengalaman dan pengetahuan praktis mereka tentang menjalankan usaha. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa elit ekonomi cenderung skeptis terhadap program-program pemerintah yang tidak memiliki kejelasan operasional dan manfaat konkret. Endaten menyatakan bahwa pemerintah desa hanya menyiapkan wadahnya saja sesuai dengan peraturan yang diberikan pemerintah, menunjukkan bahwa elit ekonomi melihat peran pemerintah desa sebagai fasilitator formal sementara substansi operasional program masih belum jelas. Sikap skeptis ini dapat dipahami dalam konteks pengalaman mereka dengan program-program sebelumnya yang seringkali gagal memberikan manfaat yang dijanjikan atau justru menciptakan beban administratif tambahan tanpa nilai ekonomi yang jelas.

Pola komunikasi antar elit dan antara elit dengan masyarakat menunjukkan karakteristik yang kompleks dan seringkali timpang. Komunikasi vertikal dari pemerintah atas ke elit formal desa cenderung bersifat instruktif dan top-down,

dengan informasi tentang program mengalir dari tingkat pusat ke kabupaten ke kecamatan dan akhirnya ke desa. Namun, kualitas informasi yang sampai ke tingkat desa seringkali terfragmentasi dan tidak lengkap, sebagaimana dikeluhkan oleh Anton yang menyatakan bahwa mereka bingung karena informasi yang mereka terima bisa berbeda dengan persepsi lembaga lain. Ketidakjelasan komunikasi ini menciptakan interpretasi yang beragam di tingkat implementasi dan berpotensi menimbulkan konflik. Komunikasi horizontal antar elit formal, elit informal, dan elit ekonomi masih terbatas dan tidak terstruktur dengan baik. Tidak ada forum reguler yang memfasilitasi dialog dan koordinasi antar kategori elit untuk membahas implementasi program secara kolaboratif. Akibatnya, masing-masing kategori elit cenderung bekerja dalam silo mereka sendiri dengan pemahaman dan ekspektasi yang mungkin tidak sejalan.

Komunikasi antara elit dengan masyarakat umum juga menunjukkan pola yang timpang. Meskipun ada forum formal seperti musyawarah desa untuk pembahasan program, partisipasi masyarakat dalam forum ini seringkali bersifat pasif dengan elit yang mendominasi diskusi dan pengambilan keputusan. Suratman, seorang akademisi yang terlibat dalam pendampingan program, menyarankan bahwa forum partisipatif di desa tidak hanya dimulai dari pengetahuan akademik tetapi bisa tumbuh dari inisiatif kelembagaan, khususnya BPD sebagai lembaga representatif masyarakat. Namun, dalam praktiknya, BPD seringkali tidak berfungsi secara optimal sebagai penyeimbang kekuasaan kepala desa dan belum efektif dalam memfasilitasi komunikasi bottom-up dari masyarakat ke elit desa. Pak Kabid Pemdes mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengurus koperasi mungkin terbuai oleh janji tentang dana yang besar (Rp3 miliar per desa) yang mungkin tidak terealisasi, dan jika itu terjadi, yang akan disalahkan adalah pemerintah desa. Kekhawatiran ini menunjukkan adanya kesenjangan ekspektasi yang muncul dari komunikasi yang tidak efektif tentang apa yang realistis dapat dicapai oleh program.

Dalam tahap inisiasi Program Koperasi Desa Merah Putih, elit formal memainkan peran dominan karena mereka menjadi penerima langsung instruksi dari pemerintah atas untuk membentuk koperasi di setiap desa. Anton menjelaskan bahwa program ini sangat ambisius dengan target 80.000 koperasi di seluruh Indonesia yang melibatkan 13 kementerian dan lembaga. Namun, ambisi besar ini tidak diikuti dengan persiapan dan koordinasi yang memadai di tingkat implementasi. Elit formal menghadapi tantangan dalam memahami konsep koperasi yang berbeda dari BUMDes yang sudah mereka kenal, serta dalam mengomunikasikan program kepada elit lain dan masyarakat umum dengan cara yang jelas dan meyakinkan. Keterbatasan pemahaman elit formal tentang program menciptakan ruang bagi interpretasi yang beragam dan potensi konflik kepentingan. Dalam kondisi ini, program yang seharusnya partisipatif dan demokratis berpotensi dijalankan secara instruktif dan top-down, di mana elit formal hanya fokus pada pemenuhan target formal pembentukan koperasi tanpa memastikan bahwa substansi partisipasi dan ownership masyarakat benar-benar terbangun.

Pembentukan kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan interaksi kompleks antara ketiga kategori elit dengan dinamika kekuasaan yang signifikan. Anton menyatakan bahwa untuk kepengurusan sudah terbentuk di seluruh Kabupaten Lebong dengan difasilitasi oleh notaris di tingkat kabupaten,

dan sekitar 90% desa sudah selesai proses formalisasinya. Meskipun secara administratif pembentukan kepengurusan telah selesai, observasi penelitian menunjukkan bahwa proses ini lebih bersifat top-down dan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Komposisi kepengurusan cenderung didominasi oleh elit formal dan sebagian elit ekonomi yang sudah memiliki pengalaman dalam organisasi formal, sementara representasi dari kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan kelompok miskin masih terbatas. Hal ini berpotensi menciptakan struktur kepemimpinan yang tidak representatif dan rentan terhadap elite capture, di mana manfaat program lebih banyak dinikmati oleh kelompok elit yang terwakili dalam kepengurusan.

Dalam operasionalisasi program, pengaruh struktur relasi kekuasaan elit desa menjadi semakin kompleks dan menentukan. Elit ekonomi memiliki keunggulan dalam hal pemahaman operasional bisnis dan akses ke sumber daya ekonomi, namun mereka juga memiliki kepentingan pribadi yang mungkin tidak selalu sejalan dengan tujuan program untuk memberikan manfaat yang merata kepada seluruh anggota koperasi. Endaten menjelaskan bahwa sudah dibentuk koperasi di tiap desa tetapi efek nyatanya belum bisa diketahui karena di desa sudah ada BUMDes. Pernyataan ini menunjukkan adanya kebingungan dan potensi tumpang tindih antara kelembagaan ekonomi yang sudah ada dengan kelembagaan baru yang dibentuk. Ketidakjelasan tentang pembagian peran dan fungsi antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih menciptakan ketidakpastian dalam operasionalisasi dan berpotensi menimbulkan kompetisi yang tidak produktif antara kedua lembaga. Pak Kabid Pemdес menyatakan bahwa hingga saat ini BPKP belum mengeluarkan update sistem keuangan desa terbaru sementara desakan agar dana desa dipakai untuk koperasi merah putih makin kuat, menunjukkan adanya tekanan dari berbagai pihak tanpa kejelasan mekanisme dan regulasi yang memadai.

Penelitian ini menemukan potensi elite capture dalam berbagai bentuk yang perlu diantisipasi. Material capture, di mana elit mengambil manfaat ekonomi yang tidak proporsional dari program, belum termanifestasi secara nyata karena program masih dalam tahap awal implementasi. Namun, struktur kekuasaan yang ada menunjukkan kerentanan terhadap praktik ini jika tidak ada mekanisme checks and balances yang efektif. Komposisi kepengurusan yang didominasi elit, akses yang tidak merata terhadap informasi dan pengetahuan tentang program, serta keterbatasan kapasitas masyarakat umum untuk melakukan monitoring dan evaluasi menciptakan kondisi yang kondusif bagi material capture. Symbolic capture, di mana elit memanfaatkan program untuk memperkuat posisi dan prestise mereka, sudah mulai terlihat dalam tahap pembentukan program. Anton mengungkapkan bahwa sampai hari ini belum ada instruksi resmi bahwa koperasi akan mendapat dana desa kecuali surat yang memperbolehkan bantuan pengurusan notaris dan badan hukum yang pun dibatasi. Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya elit formal untuk mengambil kredit atas pembentukan koperasi meskipun dukungan substantif dari pemerintah masih terbatas dan tidak jelas.

Political capture, di mana elit menggunakan program sebagai instrumen untuk memperkuat basis dukungan politik mereka, juga berpotensi terjadi dalam implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih. Dalam konteks Desa Bioa Sengok dan sebagian besar desa di Kabupaten Lebong yang saat ini dipimpin oleh pejabat sementara, program ini dapat menjadi arena bagi pejabat untuk

membangun basis dukungan dalam persiapan pemilihan kepala desa berikutnya. Distribusi posisi dalam kepengurusan koperasi, alokasi peluang ekonomi, dan pengambilan kredit atas keberhasilan program dapat menjadi instrumen political capture. Jatmiko dari Universitas Bengkulu menyarankan bahwa perguruan tinggi perlu mau tidak mau mendampingi proses implementasi program, menunjukkan kebutuhan akan pendampingan eksternal yang independen untuk memastikan bahwa program tidak dibajak oleh kepentingan politik elit. Potensi elite capture ini sejalan dengan temuan Aspinall et al. (2025) yang mengidentifikasi bahwa sepertiga dari desa yang mereka teliti termasuk dalam kategori "captured VGRs" di mana partisipasi dan kompetisi sangat terbatas dan pemerintah desa dijalankan dengan cara yang eksklusif.

Ketidakjelasan regulasi program menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dinamika relasi kekuasaan elit desa dalam implementasi program. Program yang hanya didasarkan pada Instruksi Presiden tanpa regulasi turunan yang rinci menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Pak Kabid Pemdes mengeluhkan bahwa pihaknya menjadi kelpungan karena BPKP belum mengeluarkan update sistem keuangan desa sementara desakan untuk menggunakan dana desa untuk koperasi merah putih makin kuat. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi elit untuk memanfaatkan situasi sesuai kepentingan mereka. Elit formal yang seharusnya memiliki kewenangan dalam implementasi menjadi ragu-ragu karena tidak ada dasar hukum yang jelas, sementara elit lain mungkin memanfaatkan kekosongan regulasi untuk mempromosikan interpretasi yang menguntungkan posisi mereka. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Feng et al. 2015; Warren and Visser 2016) tentang bagaimana ketidakjelasan regulasi dalam program PNPM menciptakan ruang bagi elit lokal untuk memanipulasi proses implementasi.

Potensi tumpang tindih dan konflik antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih menjadi isu penting yang mempengaruhi implementasi program. Kedua lembaga memiliki tujuan yang serupa yaitu mengembangkan ekonomi desa, namun memiliki basis hukum dan struktur organisasi yang berbeda. BUMDes memiliki landasan hukum yang jelas dalam UU Desa dan peraturan turunannya, sementara Koperasi Merah Putih masih mengandalkan Instruksi Presiden yang tidak memiliki kekuatan hukum yang setara. Dalam kondisi sumber daya yang terbatas di tingkat desa, baik dalam hal sumber daya manusia, modal, maupun pasar, keberadaan dua lembaga ekonomi dapat menciptakan kompetisi yang tidak produktif atau bahkan konflik. Anton mencoba memberikan penjelasan bahwa tidak akan terjadi benturan karena BUMDes memiliki legalitas yang jelas sementara Koperasi Merah Putih baru berdasarkan Inpres, namun penjelasan ini tidak sepenuhnya meyakinkan mengingat realitas operasional di lapangan di mana kedua lembaga akan bersaing untuk sumber daya dan pasar yang sama. Pengalaman masa lalu dengan KUD yang bersinggungan dengan berbagai kelembagaan ekonomi desa lainnya seharusnya menjadi pelajaran untuk merancang mekanisme koordinasi yang lebih baik.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kekuasaan lokal dan implementasi program pembangunan di tingkat desa. Struktur elit yang terdiri dari tiga kategori dengan basis kekuasaan yang berbeda mengkonfirmasi tipologi (Platzdasch 2011) namun dengan nuansa spesifik dalam konteks masyarakat Rejang. Dominasi elit informal dalam hal

legitimasi sosial dan efektivitas mobilisasi masyarakat menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dimensi kultural dalam desain dan implementasi program pembangunan. Efektivitas koperasi swadaya yang berbasis pada hukum sosial dan mekanisme kontrol sosial tradisional memberikan insight penting tentang alternatif model governance yang mungkin lebih sesuai dengan konteks lokal dibandingkan model formal yang diimport dari atas. Temuan ini sejalan dengan argumen (Warren 2021) tentang "captured elites" di mana dalam beberapa konteks, elit yang tertanam dalam struktur sosial tradisional dan terikat oleh ekspektasi dan norma komunitas dapat menghasilkan outcome yang lebih baik dibandingkan elit yang hanya memiliki legitimasi formal tetapi tidak tertanam dalam struktur sosial lokal.

Keterbatasan kapasitas elit formal yang teridentifikasi dalam penelitian ini mengkonfirmasi temuan (Hakim et al. 2025) tentang tantangan persisten dalam demokratisasi governance desa di Indonesia. Meskipun ada perubahan institusional formal melalui UU Desa dan berbagai regulasi turunannya, kapasitas aktual elit formal untuk mengelola program pembangunan yang kompleks masih terbatas. Keterbatasan ini tidak hanya bersifat individual dalam hal pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga struktural dalam hal akses ke informasi, pelatihan, dan pendampingan yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketergantungan elit formal pada aktor eksternal seperti pemerintah kabupaten dan akademisi untuk guidance teknis, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ownership dan sustainabilitas program. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya investasi jangka panjang dalam pengembangan kapasitas elit formal yang tidak hanya fokus pada pelatihan teknis jangka pendek tetapi juga pada pendidikan yang lebih fundamental tentang prinsip-prinsip governance, koperasi, dan pembangunan partisipatif.

Pola komunikasi yang timpang yang teridentifikasi dalam penelitian ini merupakan manifestasi dari struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Dominasi komunikasi vertikal top-down tanpa mekanisme bottom-up yang efektif mencerminkan pola governance yang masih bersifat hierarkis dan instruktif. Keterbatasan komunikasi horizontal antar elit menunjukkan fragmentasi dalam struktur governance desa di mana berbagai aktor bekerja dalam silo mereka sendiri tanpa koordinasi yang efektif. Kondisi ini sejalan dengan kritik tentang pendekatan sektoral dalam pembangunan yang menciptakan fragmentasi dan kompetisi antar lembaga dibandingkan kolaborasi. Untuk mengoptimalkan implementasi program, perlu dikembangkan platform komunikasi yang memfasilitasi dialog multi-aktor yang inklusif, di mana berbagai kategori elit dan representasi masyarakat dapat berdiskusi secara setara tentang desain, implementasi, dan evaluasi program. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi tetapi juga sebagai ruang pembelajaran kolektif di mana berbagai aktor dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Tabel 1. Matriks Hasil Penelitian: Struktur Relasi Kekuasaan Elit Desa dan Implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih

Kategori Elit	Sumber Daya & Legitimasi	Pola Komunikasi	Pengaruh terhadap Implementasi Program
Elit Formal	Modal sosial &	Komunikasi	Dominasi pada inisiasi &

Kategori Elit	Sumber Daya & Legitimasi	Pola Komunikasi	Pengaruh terhadap Implementasi Program
(Aparatur Desa)	simbolik terbatas; legitimasi legal-rasional kuat; keterbatasan modal budaya & akses informasi teknis	vertikal top-down dominan; jaringan horizontal lemah dengan elit lain & masyarakat	pembentukan formal; implementasi bersifat instruktif; kebingungan atas regulasi & koordinasi antar lembaga
Elit Informal (Tokoh Adat/Agama)	Modal sosial & simbolik sangat kuat; legitimasi tradisional & karismatik tinggi; modal budaya berbasis kearifan lokal	Jaringan horizontal mendalam dengan masyarakat; komunikasi informal efektif melalui ikatan kekerabatan	Efektif dalam mobilisasi & kontrol sosial; koperasi swadaya berbasis hukum sosial lebih berhasil; mekanisme transparansi & akuntabilitas tradisional
Elit Ekonomi (Pengusaha Lokal)	Modal ekonomi signifikan; legitimasi pragmatis berbasis kontribusi ekonomi; fokus pada aspek operasional praktis	Jaringan bisnis lokal & regional; komunikasi fungsional berorientasi ekonomi	Potensi tulang punggung operasional; sikap skeptis terhadap program tanpa kejelasan manfaat; fokus pada keberlanjutan ekonomi
Tantangan Implementasi	Ketidakjelasan regulasi (hanya Inpres); tumpang tindih dengan BUMDes; koordinasi antar elit terbatas; kesenjangan kapasitas SDM; potensi elite capture (material, symbolic, political); komunikasi top-down tanpa mekanisme bottom-up efektif		
Temuan Kunci	Dominasi elit informal dalam legitimasi sosial; keterbatasan elit formal dalam kapasitas teknis; koperasi swadaya berbasis hukum sosial lebih efektif dibanding program formal; kesenjangan antara desain program top-down dengan realitas kekuasaan lokal		

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur relasi kekuasaan dan pola komunikasi elit desa memainkan peran krusial dalam efektivitas implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bioa Sengok. Struktur elit yang terdiri dari elit formal (legitimasi legal-rasional namun kapasitas teknis terbatas), elit informal (legitimasi tradisional kuat dengan modal sosial mendalam), dan elit ekonomi (modal ekonomi signifikan namun fokus pragmatis) menciptakan dinamika kekuasaan kompleks yang mempengaruhi implementasi program. Dominasi elit informal dalam legitimasi sosial dan mobilisasi masyarakat menunjukkan pentingnya mengintegrasikan dimensi kultural dan mekanisme governance tradisional dalam desain program. Implementasi menghadapi tantangan serius berupa ketidakjelasan regulasi, tumpang tindih dengan BUMDes, pola komunikasi vertikal top-down tanpa mekanisme bottom-up efektif, serta

fragmentasi governance yang menciptakan kerentanan terhadap elite capture dalam bentuk material, symbolic, dan political capture.

Untuk mengoptimalkan implementasi dan mencegah elite capture, penelitian merekomendasikan strategi rekonfigurasi relasi kekuasaan melalui: (1) penguatan kapasitas elit formal dengan pendidikan berkelanjutan dan pendampingan independen; (2) revitalisasi peran elit informal dengan mengintegrasikan mekanisme governance tradisional ke sistem formal; (3) optimalisasi kontribusi elit ekonomi melalui kemitraan transparan dengan mekanisme profit-sharing yang adil; (4) pengembangan checks and balances melalui diversifikasi kepengurusan, penguatan BPD, dan sistem pelaporan terbuka; serta (5) penguatan basis regulasi turunan yang komprehensif. Perbaikan pola komunikasi melalui platform multi-aktor dan koordinasi dengan BUMDes sangat krusial untuk menghindari konflik dan memastikan sinergi optimal. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori elit dan elite capture di tingkat desa, menunjukkan relevansi mekanisme governance tradisional berbasis hukum sosial dalam konteks kontemporer, serta menekankan pentingnya pendekatan context-sensitive dan participatory yang mengintegrasikan wisdom lokal dalam program pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E, and N Rohman. 2017. "Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in the Remaking of Indonesia's Rural Elite." *Journal of Southeast Asian Studies*.
<https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-southeast-asian-studies/article/village-head-elections-in-java-money-politics-and-brokerage-in-the-remaking-of-indonesias-rural->
- Bapa Tokan, Frans, and Ola Urbanus. 2020. "Dinamika Politik Desa Studi Tentang Relasi Kuasa Elit Desa Dan Politik Pilkada Di Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur." *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(1).
- BPS Kabupaten Lebong. 2025. *Statistik Daerah Kabupaten Lebong 2024*.
- Dewi, Erina Yuliana, Eppy Yuliani, and Bobby Rahman. 2022. "Analisis Peran Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Wilayah." *Jurnal Kajian Ruang* 2(2). doi:10.30659/jkr.v2i2.20961.
- Feng, Yinfu, Jun Xiao, Kang Zhou, Yueting Zhuang, Karthik Ramanna, Mauro Bussani, Marta Infantino, et al. 2015. "Meso Level Influences on Long Term Condition Self-Management: Stakeholder Accounts of Commonalities and Differences across Six European Countries." *PLOS ONE* 15(3).
- Hakim, Lukman, Lala M. Kolopaking, Sofyan Sjaf, and Rilus A. Kinseng. 2025. "Assessing Village Democracy and Welfare in Rural Indonesia: An Index-Based Correlation Analysis." *Frontiers in Political Science* 7(September): 1–19. doi:10.3389/fpos.2025.1622507.
- van Klinken, Gerry, and Ward Berenschot. 2018. "Everyday Citizenship in Democratizing Indonesia." In *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, doi:10.4324/9781315628837-12.
- Lucas, A. 2016. "Elite Capture and Corruption in Two Villages in Bengkulu Province, Sumatra." *Human Ecology* 44(3): 287–300. doi:10.1007/s10745-016-9837-6.
- Maxwell, Joseph A. 2013. "Conceptual Framework: What Do You Think Is Going On?" In *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*.
- McNabb, David E. 2015. *Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management*. doi:10.4324/9781315701127.
- Miles, M.B., and A.M. Huberman. 2016. 30 Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987) *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- Platzdasch, Bernhard. 2011. "Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective." *Journal of Contemporary Asia* 41(3): 508–10. doi:10.1080/00472336.2011.582786.
- Ridder, Hans Gerd, Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. "Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook." *Zeitschrift fur Personalforschung* 28(4).

- Tokan, Frans Bapa, and Urbanus Ola. 2020. "Dinamika Politik Desa Studi Tentang Relasi Kuasa Elit Desa Dan Politik Pilkades." *Warta Governare : Jurnal Ilmu Pemerintahan V* 1(1).
- Warren, C. 2021. "Fisheries Decline, Local Livelihoods and Conflicted Governance: An Indonesian Case." *Ocean and Coastal Management* 202. doi:10.1016/j.ocecoaman.2020.105498.
- Warren, C, and L Visser. 2016. "The Local Turn: An Introductory Essay Revisiting Leadership, Elite Capture and Good Governance in Indonesian Conservation and Development Programs." *Human Ecology*. doi:10.1007/s10745-016-9831-z.
- Yin, Robert K. 2009. "Case Study Research Design and Method :Collecting Case Study Evidence." *SAGE Publications, Inc. London* (5th edn).